

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen Laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menyesatkan para *stakeholders* terhadap kredibilitas laporan keuangan yang disajikan karena tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, serta mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Selain itu tindakan manajemen laba juga dipicu oleh beberapa motivasi, salah satunya seperti pihak manajemen yang ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham atau investor bahwa kinerja perusahaan semakin baik karena laba merupakan satu tolak ukur kinerja perusahaan.

Praktik manajemen laba telah banyak terjadi dalam dunia bisnis seperti pada tahun 2017 juga terungkapnya skandal akuntansi yang terjadi pada British Telecom harus menggunakan GBP (*Great British Poundsterling*) 530 Juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun 2017 sebesar GBP 500 juta untuk membayar hutang-hutang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Modus dari kasus ini adalah dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dengan vendor. Praktik ini sudah terjadi sejak 2013, namun PwC gagal untuk mendeteksi terjadinya kasus ini. Justru kasus ini berhasil dideteksi oleh pelopor pengaduan (*whistleblower*) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG.

Yang mengejutkan adalah relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom di privatisasi.

Selain kasus dari perusahaan internasional, salah satu kasus manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia yaitu PT. Inovasi Infracom pada tahun 2015. Kasus pada perusahaan ini bermula ketika Bursa Efek Indonesia menemukan indikasi adanya manipulasi laba. Indikasi manajemen laba ini muncul ketika dirasa laporan keuangan yang diterbitkan tidak sesuai dan mengalami banyak kesalahan. Kesalahan yang mencolok terutama pada bagian penerimaan, bagian pembayaran kas pada karyawan, laba bersih persaham, asset tetap, hutang-hutang pada pihak ketiga dan berelasi. Bursa Efek Indonesia juga mempertanyakan adanya perubahan angka terhadap pembayaran kas pada karyawan. Yang mana pada laporan keuangan tidak memunculkan penjelasan adanya perubahan. Pembayaran kas kepada karyawan yang sebelumnya bernilai Rp. 1,9 Triliun pada kuartal ketiga tahun 2014 mengalami perubahan senilai Rp. 29 Milyar.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa praktik manajemen laba sudah tidak asing lagi dalam pelaporan keuangan suatu entitas bisnis di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya praktik manajemen laba dibutuhkan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dengan cara melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perilaku para efektif perusahaan. Maka diperlukan perencanaan yang baik untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba dalam

perusahaan yang mengakibatkan dampak yang buruk terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Yulianti :

Terdapat pengaruh tidak signifikan, antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba. Proksi perencanaan pajak lain yang sering diteliti adalah tariff pajak efektif. (Efektif Tax Rate,ETR) ¹

Manajemen Laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait.

Menurut Scoot dalam penelitian Ferry :

Manajemen Laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), take a bath, dan income maximization²

Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (agen). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

¹ Ferry Aditama, Anna Purwaningsih, **Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba**, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Hal.2.

² Ferry Aditama, Anna Purwaningsih, **Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia**, Jurnal Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, Hal.4.

Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, Sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan. serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya.

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Menurut Suandy :

Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan hutang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.³

Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*), merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan Negara guna pembiayaan, pembangunan Negara. Salah satu

³ Endang Mahpuddin, **Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Jakarta Islamic Index**, Jurnal, Universitas Singaperbasa Karawang, Vol.02, 2017, Hal.10.

sector pajak yang paling besar diperoleh Negara adalah Pajak Penghasilan. Mulai tahun pajak 2009, tarif pajak badan PPh badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan telah menjadi 25% pada tahun 2010 dan berjalan hingga saat ini. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2019 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Berubahnya tarif PPh badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan tarif PPh badan menjadi tarif tunggal dan diturunkannya PPh badan menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% mulai tahun 2010, dapat memberikan intensif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan memperkecil laba kena pajak (*taxable income*), sehingga beban pajak perusahaan tersebut akan semakin kecil.

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Beberapa diantaranya adalah Sumomba serta Wijaya dan Martani. Sumomba meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dalam rangka mencari tahu respon manajemen terhadap perubahan tarif pajak pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 pada perusahaan manufaktur. Sedangkan Wijaya dan Martani meneliti tentang praktik manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak sesuai UU No.36 tahun 2008. Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga

memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2009 hingga tahun 2012 yang merupakan tahun setelah UU No.36 tahun 2008 telah berjalan dengan tarif PPh badannya telah turun menjadi 25%. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bukan perusahaan manufaktur seperti pada penelitian Sumomba sebelumnya.

Proses pembangunan suatu Negara tidak terlepas dari adanya pajak, termasuk juga Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, kegiatan Negara sulit dilaksanakan, karena sebagian besar dana yang digunakan dalam membiayai pengeluaran sehubungan dengan penyelenggaraan Negara berasal dari pajak. Pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya. Seperti sanksi administratif yang merupakan pemborosan sumber daya.

Sudut pandang dari segi ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari sektor penerimaan pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*.

Self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Pada dasarnya, wajib pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan pembuatan legal yang menggunakan *loopholes* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam kegiatan usaha sangat diperlukan perencanaan atas biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Wajb pajak badan memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak, namun tidak semua wajib pajak badan mau membayar pajak dengan jumlah yang besar. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar semua aturan yang berlaku.

Menurut Suandy :

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan

perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.⁴

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah. *Tax planning* dilakukan bukan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga kita ketahui bahwa tujuan pokok *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena itu, pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sebuah tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan hal tersebut merupakan tindakan illegal, karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang secara efektif sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefesiensi pembayaran beban pajak. Dan efektivitas perencanaan pajak yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang dicapai secara keseluruhan.

Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi tentang proses akuntansi suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang kemudian digunakan oleh

⁴ Ferry Aditama, Anna Purwaningsih, **Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.26,2014.

pihak manajemen dalam mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan manajemen di periode mendatang, atau oleh pihak eksternal seperti calon investor dalam penggunaan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu jenis laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.

Angka laba yang tersedia pada laporan keuangan selain memberikan informasi mengenai laba juga mempengaruhi pemakai informasi mengenai laba juga dalam pengambilan keputusan mengenai perusahaan. Baik keputusan investasi maupun keputusan kredit. Namun, terkadang informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Karena informasi laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang masih sering menjadi target rekayasa melalui tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih baik dan mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah satunya adalah manajemen laba.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Santana dan Wirakusuma dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi empiris pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012). Perencanaan pajak terhadap manajemen laba berpengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba. Hasil yang tidak konsisten pada peneliti terdahulu tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba memotivasi untuk melakukan

penelitian lebih lanjut tentang fakta yang memotivasi praktik manajemen laba. Penelitian ini mengacu pada Aditama dan Purwaningsih, yang menguji Pengaruh perencanaan pajak terhadap Manajemen Laba perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012.

Ulfah (2012) dengan judul pengaruh beban pajak terhadap manajemen laba menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Disamping itu, Ulfah (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan. Sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

Penelitian terdahulu juga dilakukan Sumomba (2010) tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2008 dan 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2008, beban pajak dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan pada tahun 2009, hasilnya tidak berpengaruh.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka tujuannya dilakukan penelitian ini adalah menguji kembali faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba pada perencanaan pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan *discretionary accrual* sebagai ukuran manajemen laba karena pengakuan akrual laba atau beban bersifat bebas, tidak diatur

dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Dimana basis akrual ini menyediakan manajemen perusahaan kemudian dapat melakukan manipulasi laba dengan menggunakan *discretionary accrual* yang biasa disebut manajemen laba. Alasan peneliti menggunakan perusahaan nonmanufaktur sektor jasa properti, real estate dan konstruksi bangunan sebagai objek penelitian, karena peneliti melihat adanya beberapa perusahaan jasa tersebut menyajikan presentase kenaikan dan penurunan laba secara signifikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji apakah perencanaan pajak akan mempengaruhi manajemen laba tersebut dan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pada fenomena dan berbagai pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengangkat judul pada penelitian ini “Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang baik, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian memperoleh temuan yang berfokus melalui pendalaman masalah dan untuk menghindari penafsiran berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Peneliti membatasi penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu perencanaan pajak dikarenakan

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana perusahaan meningkatkan laba perusahaan dengan penghematan melalui perencanaan pajak serta variabel dependen yaitu manajemen laba. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba terhadap perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dan dapat dijadikan bagi civitas akademika yang lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di bidang Akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan khususnya perbankan, yaitu diharapkan memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh perencanaan pajak, agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari kecurangan Akuntansi seperti manajemen laba.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori yang melandasi praktik Manajemen Laba

2.1.1. Teori Keagenan

Teori Keagenan menjelaskan dan memprediksi perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan.

Menurut Adanan dan Berliana :

Hubungan keagenan dapat digunakan untuk memahami perilaku organisasi dengan menguji bagaimana pihak-pihak yang memiliki hubungan keagenan dalam suatu perusahaan memaksimumkan kesejahteraan mereka. ⁵

Menurut Jensen dan Meckling

Teori keagenan merupakan suatu hubungan keagenan yang muncul pada saat satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. ⁶

Teori keagenan didasarkan hubungan tanggung jawab dengan manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dalam suatu perusahaan. *Principal* adalah pemberi wewenang, yang dapat diartikan sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham

⁵ Adanan dan Berliana, **Teori Akuntansi Konsep Keuangan**, Buku 1 : Universitas HKP Nommensen, Medan, 2019, Hal.41.

⁶ Eka Lestari Murmanto, **Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.26,2014.

yang melimpahkan kewenangan untuk mengelola perusahaan kepada *agen*. *Agen* merupakan individu atau personel yang diperkerjakan untuk mewakili *principal*.

Hubungan tersebut menyebabkan adanya dua kepentingan yang berbeda antara manajemen maupun pemilik yang memicu timbulnya konflik keagenan. Dimana manajemen (*agent*) dituntut secara wajib untuk memberikan informasi tentang aktifitas kinerja perusahaan yang dijalankan secara lengkap kepada pihak *principal*. Namun, terkadang informasi yang disampaikan tidak dengan sesuai fakta yang ada dalam perusahaan. Hal itu dilakukan karena manajer berasumsi bahwa tanggung jawab besar yang diberikan kepada mereka harus mendapat imbalan yang besar juga. Disisi lain, *principal* sebagai pihak pemegang saham yang memberi wewenang tugas kepada agen memiliki keterbatasan akan kinerja *agen* dan perusahaan secara menyeluruh.

Hal tersebut dapat menimbulkan asimetri informasi, kondisi ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen (*agen*) dan pemegang saham (*principal*). Dimana manajer memiliki lebih banyak informasi daripada pemegang saham karena manajer sebagai pengelola perusahaan yang mengakibatkan manajemen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya. Sehingga informasi yang lebih sedikit yang dimiliki oleh pemegang saham, dapat memicu manajer menggunakan posisinya dalam perusahaan untuk mengelola laba yang dilaporkan.

2.1.2. Teori Akuntansi Positif

Menurut Watts dan Zimmerman :

Faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan.⁷

Hal ini dikarenakan akuntansi teori akuntansi positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan :

- 1) Antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*),
- 2) Antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan
- 3) Antara manajemen dan pemerintah (*the political hypothesis*)

3 Hipotesis utama dalam Teori Akuntansi Positif (Watts dan Zimmerman) :

1. *The bonus plan hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

2. *The debt to equity hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian hutang,

⁷ Sofyan Syahrifudin, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi 11, Hal.25.

maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (*income creasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

3. *The political cost hypothesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

2.2. Manajemen Laba

2.2.1. Pengertian Manajemen Laba

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan cara memaksimalkan laba yang diperoleh. Laba yang baik dapat diperoleh dari kegiatan utama perusahaan ataupun investasi-investasi yang dimiliki. Tetapi ini tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ketika manajemen tidak dapat mencapai tujuan perusahaan, maka memicu tindakan kecurangan yang salah satunya adalah manajemen laba.

Menurut Scott dalam Kelvin dan Ernie :

Manajemen Laba didefinisikan sebagai pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen untuk mencapai tujuan khusus. Manajemen Laba merupakan suatu proses yang disengaja, menurut batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu.⁸

Scott juga mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi manajemen dalam menyusun pelaporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya.

Manajemen Laba dibagi menjadi 2. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang, *political costs (opportunistic earning management)* . Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earning management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Apabila manajemen laba bersifat oportunis, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan keputusan pengambilan investasi yang salah bagi auditor.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa Manajemen Laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer untuk mengatur laba dengan cara

⁸ Kelvin Gunarto dan Erni Riswandari, **Pengaruh diversifikasi operasi, Kepemilikan manajerial, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba**, Jurnal: Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 2019, Hal. 363.

memanipulasi angka-angka pada laporan keuangan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan kemauan pihak manajer, sehingga memberikan gambaran yang bias bagi pemakai laporan keuangan dalam mempercayai angka pada laporan keuangan. Oleh karena itu, tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.

2.2.2. Pola Manajemen Laba

Terdapat 5 pola Manajemen Laba yang dikemukakan oleh Scott (2000) dalam Tegar Rahardi (2013), yaitu :

1. Taking a bath

Pola terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kegiatan dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang.

2. Income minimization

Pola manajemen laba yang dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba pada periode sebelumnya.

3. Income maximization

Pola manajemen laba yang dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.

4. *Income smoothing*

Pola manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi frekuensi laba yang lebih besar. Karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

5. *Timing Revenue dan Expenses Recognition*

Pola manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi. Misalnya, pengakuan prematur atas pendapatan.

2.2.3. **Motivasi Laba**

Scott (2000) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontaktual lainnya, motivasi politik, motivasi pajak, pengantian CEO, dan pemberian informasi kepada investor. Berikut ini akan diuraikan setiap motivasi dari praktik manajemen laba :

1. *Motivasi Bonus (Bonus Purpose)*

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan Akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual. Termasuk perjanjian hutang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya.

3. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Perusahaan besar dan industri strategikan cara untuk menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan visabilitas nya dengan cara menggunakan prosedur Akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

4. Motivasi Pajak (*Taxacation Motivation*)

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya di nilai dengan baik.

6. *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang pertama kali akan *go public* belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada

laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Pemberian Informasi kepada Investor (*Communicate Information to Investor*)

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya, investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

2.2.4. Teknik Manajemen Laba

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Setiowati (2007) menyatakan bahwa ada 3 teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain; estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktivasi tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

Mengubah metode akuntansi manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

2. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

2.2.5. Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Philips Et.Al :

Praktik manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkap adanya praktik manajemen laba, ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba. Model yang digunakan

peneliti sebagai proksi manajemen laba adalah pendekatan distribusi laba.⁹

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasikan batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba.

2.3. Perpajakan

2.3.1. Pajak dan Fungsi Pajak

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Umumnya perencanaan pajak menunjuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan pajak yang berlaku. Sehingga perencanaan pajak merupakan tindakan legal selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak perlu dipahami terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri. Dimana merupakan

⁹ Edgina Antonio, **Analisis Pengaruh Reputasi Auditor, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Lavarage, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Komite Audit Independen Terhadap Manajemen Laba**, Universitas Diponegoro, Semarang 2008, Hal.26.

iuran dari rakyat untuk kas Negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Adapun definisi pengertian pajak adalah :

Menurut UU No.28 tahun 2017 dalam J. Eko Lasmana :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. ¹⁰

Menurut PJA. Adriani dalam Oloan Simanjuntak dkk :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. ¹¹

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga Negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hasil pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

¹⁰ Eko Lasmana, ~~Undang-Undang~~ **Undang-Undang Pajak Lengkap**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, Hal.3.

¹¹ Oloan Simanjuntak,dkk, **Hukum Pajak**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan,2009, Hal.26.

Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu:

1. *Fungsi Budgetair/ Finansial*

Fungsi Finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pemerintah dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

2. *Fungsi Regulerend/Mengatur*

Fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.3.2. Tarif Pajak

1. *Tarif Tetap*

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

2. *Tarif Sebanding (Proporsional)*

Tarif sebanding adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

3. *Tarif Meningkat (Progresif)*

Tarif meningkat adalah tarif berupa presentase yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak

4. Tarif Menurun (*Degresif*)

Tarif menurun adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajaknya.

2.3.3. Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, namun perlu diingat bahwa legalitas *tax management* tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Erly Suandy :

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.¹²

Menurut Chairil Anwar Pohan :

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis. Sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.¹³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi

¹² Erly Suandy, **Perencanaan Pajak**, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal.6.

¹³ Chairil Anwar Pohan, **Manajemen Perpajakan**, Edisi Revisi: PT. Gramedia Jakarta, 2013, Hal.13.

maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

2.4. Perencanaan Pajak

2.4.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan.

Menurut Mohammad Zain :

Perencanaan pajak adalah tindakan perstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiesikan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan buka penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.¹⁴

Seminimal mungkin dalam hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak, dilakukan

¹⁴ Mohammad Zain, **Manajemen Perpajakan**, Edisi 3: Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hal.67.

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan.

Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, dimana proses perngorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal diatur dan dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Jenis Perencanaan Pajak

Jenis Pajak menurut Erly Suandy dalam perencanaan pajak, jenis pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Perencanaan Pajak Domestik

Sebelum melakukan suatu perencanaan dosmetik, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, teori dan praktik akuntansi yang berlaku, serta praktik administrasi perpajakan.

2. Perencanaan Pajak Internasional

Perencanaan pajak internasional selalu berkontribusi pada 2 hal. Yaitu, *withholding taxes* dan *tax haven*. Namun dalam perkembangannya sekarang, perencanaan pajak internasional lebih dilakukan pada penggunaan Negara-Negara yang mempunyai pajak yang tinggi.

2.4.3. Strategi Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa agar beban pajak (*tax burdens*) serendah mungkin dengan memanfaatkan perauran yang ada. Strategi yang dapat ditempuh untuk mendefenisikan beban pajak secara legal, yaitu :

1. *Tax saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefesiensikan beban pajak melalui alternatif pajak dengan pengenaan tarif yang lebih rendah.

Tax saving (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengelak hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang benar.

2. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berkenaan dengan peraturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atau perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi,

menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

3. Penundaan / penggeseran pembayaran pajak

Penundaan / penggeseran pembayaran kewajiban pajak dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai dengan batas waktu yang diperkenankan. Khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

4. Memaksimalkan biaya fiskal

Biaya fiskal adalah biaya yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah di sah kan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih mata uang kurs.
- f. Baiaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- g. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau lebih dipublikasikan

dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu.

- h. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
 - i. Sumbangan dalam rangka penelitian atau pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Mengoptimalkan beban pajak

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Karena sebetulnya pembayaran tersebut merupakan pajak yang dibayar dimuka. Misalnya, kredit pajak untuk PPh badan terdiri dari PPh pasal 22 atas pembelian solar dan atau import dan fiskal perjalanan dinas pegawai.

6. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar

Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

7. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

2.4.4. Ukuran Efektivitas Perencanaan Pajak

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan, serta kualitas yang memadai. Dalam *tax planning* dikatakan efektif jika perencanaan pajak yang telah dilakukan mencapai atau mendekati target sasaran. Dikatakan efektif jika perencanaan pajak dilakukan dengan baik. Perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang di desain dan di implementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

2. Secara bisnis masuk akal

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan harga pasar yang wajar. Yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung memadai (Mis: Kontrak, Invoice, Faktur Pajak, PO dan DO)

Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat di buktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau PO dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa, invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihan atau pembukuannya. (*General Ledger*)

Beberapa trik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak (*tax planning*) suatu perusahaan agar lebih efektif yaitu:

1. Memaksimalkan biaya yang dikurangkan

Seringkali petugas pembukuan menggunakan istilah yang kurang tepat untuk biaya-biaya tertentu, sehingga waktu dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan.

2. Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung dalam suatu kelompok usaha

Kadang-kadang terdapat perusahaan yang terus merugi sebelum menghasilkan laba. Sedangkan di perusahaan lain yang sejenis sudah langsung menghasilkan laba. Dengan demikian secara kelompok, perusahaan membayar PPh atas laba yang lebih besar dari laba sebenarnya.

3. Menunda penghasilan

Misalnya buku perusahaan di tutup pada tanggal 31 desember, pada bulan desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 maret tahun berikutnya. Disamping itu, angsuran PPh 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen agar penyerahan barang dilakukan pada awal Januari tahun berikutnya. Karena dengan demikian pembayaran pajaknya dapat ditunda selama satu tahun.

4. Percepat pembebanan biaya

Pada akhir tahun fiskal, sebaiknya dilakukan *review* untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat dibebankan pada tahun tersebut. Misalnya: biaya konsultan hukum, konsultan pajak dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, perusahaan dapat menunda pembayaran pajaknya selama sebulan.

5. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak dapat dilakukan dengan cara merekayasa biaya-biaya yang

6. berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan.

7. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri

Banyak kejadian dalam praktik bisnis internasional, perusahaan local terpaksa menanggung pajak yang seharusnya menjadi beban perusahaan luar negeri tersebut karena tidak teliti melihat klausul perpajakannya dalam kontrak perjanjian.

2.5. Tujuan dan Manfaat perencanaan pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak yang baik adalah :

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba beban pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana. Seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan. Seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, PPh pasal 22 dan 23).

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

2. Mengatur aliran kas masuk dan (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Enny Endriati, Hj.Nur Hidayati dan Junaidi	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
2	Husnul Khotimah	Pengaruh Perencanaan pajak terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap besaran <i>discretionary accrual</i> .
3	Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih	Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitiannya yaitu perencanaan pajak tidak terlalu berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini, untuk mengatasi keterbatasan masalah dilakukan dengan menghindari penurunan laba.
4	Yunita Sari dan Junawan	Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak terlalu berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur.

		Indonesia.	
--	--	------------	--

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan factor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel bebas dengan variabel yang terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. Variabel terikatnya adalah manajemen laba.

Berdasarkan informasi di atas, maka hubungan antar variabel dapat dikemukakan pada gambar:



2.8. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasa dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empiris. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan hipotesis tersebut.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

2.8.1. Pengaruh perencanaan pajak dengan manajemen laba

Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor pajak yang paling besar menyumbang penerimaan Negara. Pada tahun 2009, tarif PPh badan mulai menganut sistem tarif tunggal (*single tax*) yaitu sebesar 28% yang sebelumnya menggunakan sistem tarif berlapis. Mulai tahun 2010, tarif PPh badan mengalami penurunan menjadi 25% dan berlaku hingga saat ini. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah salah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23%. Dan pada tahun 2010 sebesar 20%. Karena adanya perubahan (penurunan) tarif tunggal PPh badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang berlaku hingga saat ini. Hal ini dapat memberikan intensif dan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dengan cara memperkecil laba karena pajak (*taxable income*), yang akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya Sumomba (2010) serta Wijaya dan Martrani (2011). Sumomba meneliti mengenai perencanaan pajak terhadap manajemen laba, akan tetapi sampel yang digunakan adalah perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Wijaya dan Martani meneliti mengenai manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak sesuai UU No.36 tahun 2008, yang menggunakan beberapa tambahan variabel perencanaan pajak di dalamnya. Seperti kewajiban pajak tangguhan bersih, *earning preasure*, *earning bath*, tingkat hutang, ukuran perusahaan dan presentase saham yang diperdagangkan di BEI.

Kedua penelitian diatas berhasil menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Sumomba (2010) berhasil membuktikan bahwa perencanaan pajak yang diukur menggunakan tingkat retensi pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba, dalam rangka merespon perubahan tarif pajak dari 28% ke 25% sesuai dengan UU.No 36 tahun 2008. Sejalan dengan penelitian Sumomba, Wijaya dan Martani (2011) penelitian mereka membuktikan bahwa beberapa variabel seperti perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan bersih, dan *earnings preasure* juga berpengaruh positif terhadap variabel manajemen laba.

Ho : Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap praktik Manajemen Laba

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efektif dan efisien. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini nantinya dapat diperoleh informasi yang menjelaskan suatu keadaan dan kondisi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan jasa tahun 2017-2020 yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Sumber data penelitian ini adalah dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dengan melihat perusahaan-perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sebelum dilakukannya analisis data peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan penelitian yang diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan gambaran yang diharapkan oleh peneliti untuk keberlangsungan penelitian, pada umumnya sumber data dalam penelitian disebut populasi dan sampel penelitian.

3.3.1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono dalam Sartika Tambunan:

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵

Menurut Syahrin & Salim:

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan *universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dan manusia, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek/objek yang dipelajari. Tetapi meliputi seluruh karateristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.

¹⁵ Sartika Tambunan, **Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba**, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2009, Hal. 32.

¹⁶ Syahrin & Salim, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cet. 1, Cita Pustaka Medan, 2007, Hal. 113.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020. Total populasi yaitu 65 perusahaan.

3.3.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan sebagai upaya peneliti untuk menetapkan bagian dari populasi. Pengambilan sampel yang dilakukan pada metode ini menggunakan metode *purpostive sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria peneliti. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan nonmanufaktur yang bergerak di sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2020.
2. Perusahaan nonmanufaktur menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2017-2020 di website BEI.
3. Menyajikan laporan keuangan dalam jumlah rupiah selama periode 2017-2020.

Tabel 3.1

Jumlah Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi	65

Bangunan	
Perusahaan nonmanufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit dan tidak memiliki informasi tentang kepemilikan manajerial	32
Perusahaan yang dapat digunakan menjadi sampel	33

Tabel 3.2

Daftar Populasi Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Kriteria			Sampel
			1	2	3	
1	ARMY	Armidian Karyatama Tbk	√		√	
2	APLN	Agung Podomoro Land Tbk	√	√	√	1
3	ASRI	Alam Sutera Reality Tbk	√	√	√	2
4	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk	√	√	√	3
5	BAPI	Bhakti Agung Propertindo Tbk	√		√	
6	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk	√	√	√	4
7	BEST	Bekasi Fajar Industri Estate Tbk	√	√	√	5
8	BIKA	Binakarya Jaya Abadi Tbk	√	√	√	6
9	BIPP	Bhuawanatala Indah Permai Tbk	√	√	√	7
10	BKDP	Bukitr Darmo Properti Tbk	√	√	√	8
11	BKSL	Sentul City Tbk	√	√	√	
12	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	√	√	√	9
13	CITY	Natura City Developments Tbk	√		√	
14	COWL	Cowell Deveploment Tbk	√	√	√	

15	CPRI	Capri Nusa Satu Properti Tbk	√		√	
16	CTRA	Ciputra Development Tbk.	√	√	√	10
17	DART	DutAnggada Realty Tbk.	√		√	
18	DILD	Intiland Development Tbk	√	√	√	
19	DMAS	Puradelta Lestari Tbk	√	√	√	11
20	DUTI	Duta Pertwi Tbk	√	√	√	12
21	ELTY	Bakrieland Development Tbk	√		√	
22	EMDE	Megapolitan Development Tbk	√	√	√	13
23	FMII	Fortune Mate Indonesia	√	√	√	14
24	FORZ	Foza Land Indonesia Tbk.	√		√	
25	GAMA	Gading Development Tbk	√	√	√	15
26	GMTD	Goa Makassar Tourism Development Tbk	√	√	√	16
27	GPRA	Perdana Gapura Prima Tbk	√	√	√	17
28	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk	√	√	√	18
29	INDO	Royalindo Investa Wijaya Tbk	√	√	√	19
30	JRPT	Jaya Real Property Tbk.	√	√	√	20
31	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	√	√	√	21
32	KOTA	DMS Proertindo Tbk	√		√	
33	LAND	Trimitra Propertindo Tbk	√		√	
34	LCGP	Eureka Prima Jakarta Tbk (d.h Laguna Cipta Griya Tbk)	√		√	
35	LPCK	Lippo Cikarang Tbk	√		√	
36	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	√		√	
37	MDLN	Modernland Realty Tbk	√	√	√	22

38	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk	√	√	√	23
39	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk	√	√	√	24
40	MPRO	Propertindo Mulia Investama Tbk	√		√	
41	MLTA	Metropolitan Land Tbk	√	√	√	
42	MYRX	Hanson International Tbk	√		√	
43	NIRO	Nirvana Development Tbk	√	√	√	25
44	NZIA	Nusantara Almazia Tbk	√		√	
45	MORE	Indonesia Prima Properti Tbk	√		√	
46	PAMG	Bima Sakti Pertiwi Tbk	√		√	
47	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk	√	√	√	26
48	POLI	Pollux Investasi Internasional Tbk	√		√	
49	POLL	Pollux Properti Indonesia Tbk	√		√	
50	POSA	Bliss Properti Indonesia Tbk	√		√	
51	PPRO	PP Properti Tbk	√	√	√	27
52	PUDP	Pudjiati Prestige Tbk	√	√	√	28
53	PWON	Pakuwon Jati Tbk	√	√	√	29
54	REAL	Repower Asia Indonesia Tbk	√		√	
55	RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk	√		√	
56	RBMS	Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk	√	√	√	30
57	RDTX	Roda Vivatex Tbk	√	√	√	
58	RODA	Pikko Land Development Tbk	√	√	√	31
59	SATU	Kota Satu Properti Tbk	√		√	
60	SCBD	Dadanayasa Arthatama Tbk	√		√	
61	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk	√	√	√	32

62	SMRA	Summarecon Agung Tbk	√	√	√	
63	TARA	Sitara Propertindo Tbk	√	√	√	33
64	TRIN	Perintis Trinita Properti Tbk	√		√	
65	URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk	√		√	

Sumber: www.idx.co.id

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode, yaitu sebagai berikut :

1. Studi dokumentasi, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengantaran terhadap laporan keuangan (objek) yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Sumber-sumber data seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.
2. Studi pustaka, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, artikel, media tulis jurnal yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dan analisis yang dilakukan dalam penelitian.

3.5. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel. Variabel yang pertama merupakan variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel kedua yaitu variabel bebas (*independent variable*).

Tabel 3.3

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Perencanaan pajak	Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya.	Menggunakan rumus <i>tax retention rate</i> (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.	Rasio
Manajemen Laba	Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi.	Menggunakan <i>discretionial accrual</i> (yang dihitung dengan Model Joses, telah dimodif: TACit=100%)	Rasio

3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen

laba. Penyajian laba merupakan hal yang sering di manipulasi oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang terlihat menguntungkan. Usaha ini disebut dengan manajemen laba. Penelitian ini menggunakan *discretionary accrual* (DA) dihitung menggunakan model Jones yang

telah dimodifikasi untuk mengukur tingkat manajemen laba. Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba. Untuk mendapatkan nilai *Discretionary Accrual* dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menghitung nilai *Total Accrual* (TAC)

$$TAC_{it} = Nit - CFO_{it}$$

Keterangan :

TAC_{it} = *Total Accrual* perusahaan i pada periode t

Nit = Laba bersih perusahaan (*net income*) perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan (*Cash Flow Operating Activities*) perusahaan i pada periode t.

- 2) Nilai *Total Accrual* (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\left(\frac{DA_{it}}{PP_{it}} \right) = \beta_1 \left(\frac{1}{PP_{it}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta R_{it}}{PP_{it}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PP_{it}}{PP_{it}} \right) + \epsilon$$

Keterangan :

TAit = *Total Accrual* perusahaan i pada periode t

Ait-1 = Total Aset perusahaan i pada periode t

ΔR_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan periode t-1

PPEit = Nilai asset tetap perusahaan i pada periode t

3) Menghitung nilai Nondiscretionary Accruals (DNA)

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta R_{it} - \Delta R_{it-1}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Keterangan :

NDAit = *Non Discretionary Accrual* perusahaan i pada periode t

Ait = Total Asset perusahaan i pada periode t

ΔR_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode dan periode t-1

ΔR_{it} = Perubahan piutang perusahaan i antara periode t dengan periode t-1

PPEit = Nilai asset perusahaan i pada periode t

4) Menghitung *Discretionary Accrual* (DA) dengan persamaan berikut:

$$DAC_{it} = \frac{NDA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DAC_{it} = *Discretionary Accrual* perusahaan i pada periode t

A_{it} = Total Aset perusahaan i pada periode t

TA_{it} = *Total Accrual* perusahaan i pada periode t

NDA_{it} = *Non Discretionary Accrual* perusahaan i pada periode t

3.5.2. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain secara positif dan negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak.

$$EBIT = \frac{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}{\text{Pretax Income (EBIT) it}}$$

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana yang merupakan teknik dalam menganalisis suatu data atau informasi. Dimana teknik tersebut akan menguji hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Oleh karena itu, sebuah model sebelum digunakan harus melewati pengujian yang sering disebut dengan pengujian asumsi klasik. Jika model regresi sudah melewati pengujian asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis.

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bisa mengingot tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas data, uji multikolenieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.6.1.1. Uji Normalitas Data

Uji ini berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametrik. Dan jika data tidak normal, gunakan statistik nonparametrik, atau lakukan percobaan agar normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, variabel independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji kenormalan data juga bisa dilakukan tidak berdasarkan grafik, misalnya dengan

Uji Kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikan $>0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.

3.6.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* atau residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas. Sementara itu untuk varian yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk membuktikan adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) menyebar di atas dan dibawah angka nol (0) maka tidak terjadi.

3.6.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji dalam model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) atau tidak. Apabila terdapat korelasi antar residual maka model regresi mengalami masalah autokorelasi.

3.6.2. Analisis Regresi Sederhana

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Manajemen Laba

a = Konstanta

b = Koefesien Regresi

X = Perencanaan Pajak

3.6.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Pengujian hipotesis menggunakan pengujian secara parsial (Uji t)

3.6.3.1. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji koefesien regresi secara parsial dari variabel independennya. Atau dengan kata lain menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05% (=5%). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari, maka hipotesis

diterima (koefisien regresi signifikan). Berarti secara individual, variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Yang berarti, secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3.2. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2=0$. Menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bila R^2 semakin kecil mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lain. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek itu.